



KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
2019

RABU : 10 FEBRUARI 2021
EDISI : 00226301/GBP/II/2021

KLIPING

Berita Pertanian



RABU, 10 PEBRUARI 2021

00000000000000000000 000 0000000000000000

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☒ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 8/2/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 7 / 1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☒ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika		☐ Pjok/Karikatur

Hadapi Puasa, Kementan Minta Importir Daging Gerak Cepat

JAKARTA—Kementerian Pertanian (Kementan) mengimbau para importir yang telah memperoleh rekomendasi dan izin segera merealisasikan pemasukan daging sapi beku pada Maret, April, dan Mei ini. Hal tersebut demi menjaga ketersediaan stok dan stabilisasi harga daging sapi/kerbau pada Puasa-Lebaran 2021. Dari laporan para importir, per 28 Januari 2021, stok daging sapi/kerbau yang ada di importir swasta dan BUMN masih 6.998,69 ton, termasuk 477,45 ton jeroan, sehingga realisasi pemasukan harus diperhatikan oleh importir demi meningkatkan stok di gudang, khususnya untuk menghadapi Puasa-Lebaran.

Kementan terus berupaya mengantisipasi kebutuhan dan ketersediaan daging sapi/kerbau serta gejolak harga daging, khususnya saat Puasa-Lebaran 2021. Kebutuhan daging sapi/kerbau secara nasional untuk 2021 mencapai 696.956 ton dengan perhitungan konsumsi per kapita 2,56 kg per tahun. Ketersediaan daging sapi/kerbau lokal hanya 473.814 ton, sehingga kebutuhan dan ketersediaan daging sapi/kerbau nasional tahun ini masih perlu 223.142 ton. Kekurangan inilah yang akan dipenuhi dari impor, baik dalam bentuk sapi bakalan, bakalan yang dipotong, dan impor daging sapi atau kerbau.



Nasrullah

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Nasrullah menjelaskan, impor yang akan dilakukan pemerintah secara rinci adalah dalam bentuk sapi bakalan 502 ribu ekor, bakalan yang dipotong 430 ribu ekor atau setara 96.367 ton, dan impor daging sapi/kerbau 185.500 ton. Dengan proyeksi itu, stok akhir tahun 2021 nantinya sebanyak 58.725 ton yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan daging Januari-Maret 2022. "Dengan makin dekatnya Puasa-Lebaran maka Kementan pun mengimbau para importir daging untuk merealisasikan pemasukan. Kami minta importir untuk melaporkan rencana realisasi pemasukan daging sapi/kerbau selama 2021, khususnya untuk Maret, April, dan Mei 2021," ujar Nasrullah.

Dalam keterangan Kementan, Selasa (9/2), juga disebutkan, karena umumnya masyarakat Indonesia memilih daging

sapi segar maka untuk kebutuhan Puasa-Lebaran importir diimbau agar dapat menyediakan potongan karkas impor dalam bentuk segar dingin (*chilled*) yang akan dijual ke pasar dalam bentuk daging sapi segar dengan harga yang lebih terjangkau. Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementan Syamsul Ma'arif meminta para importir daging berkomitmen membantu pemerintah dalam penyediaan daging sapi/kerbau dan mencegah gejolak harga daging saat Puasa-Lebaran 2021. "Diharapkan segera merealisasikan izin impor yang telah diberikan. Importir yang sudah pernah mengimpor dan saat ini masih memiliki izin impor potongan *chilled* juga agar segera merealisasikan impornya," kata Syamsul.

Para importir juga diminta bekerja sama dengan pemerintah daerah agar dapat bersama-sama melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga daging sapi/kerbau saat Puasa-Lebaran 2021. "Kami juga ingin meminta dukungan dan komitmen dari semua unsur untuk bersama-sama mengantisipasi ketersediaan dan mencegah terjadinya gejolak harga daging. Kami juga menerima masukan dan usulan konkret dari seluruh pihak dalam upaya menjaga ketersediaan daging," tutur Syamsul. (d)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☒ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 10/2/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 4/1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☒ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

KOMODITAS UNGGULAN

Sulut Ekspor Produk Turunan Kelapa

BITUNG, KOMPAS — Ekspor produk turunan kelapa dari Sulawesi Utara kian beragam dengan penjualan *cocopeat*, serbuk halus sisa pengolahan sabut kelapa. Pengusaha berharap pemerintah meremajakan tanaman kelapa dan membuat kebijakan menurunkan biaya peti kemas demi menggenjot ekspor.

Perusahaan pertama asal Sulut yang mengekspor *cocopeat* adalah CV Puri Bitung Gemilang di Kelurahan Manembo-Nembo, Bitung. Hermanto (62), pemilik perusahaan, Selasa (9/2/2021), mengaku dua kali mengekspor *cocopeat*. Pekan lalu, 75 ton *cocopeat* diekspor ke Korea Selatan. Ia mendapatkan Rp 101,21 juta dari penjualan tersebut.

"Saya kirim dengan beberapa peti kemas 40 kaki, bisa muat 22 ton maksimal. *Cocopeat* diminati petani dan warga karena sebagai media tanam untuk sayur dan buah, serta bisa cenderung lebih mampu menyuburkan," kata Hermanto.

Dengan proporsi produksi 40 persen serat kelapa (*cocofiber*) dan 60 persen *cocopeat*, perusahaan Hermanto dapat menghasilkan 7-8 ton serat kelapa dan 10,5-16 ton *cocopeat*. Seluruh sabut kelapa dibeli dari petani dan pengepul lokal.

Hermanto dapat menggelontorkan Rp 2,2 juta per minggu untuk seorang pemasok sabut. Menurut dia, ini menunjukkan besarnya kemanfaatan kelapa sehingga petani kelapa tidak hanya bergantung pada kopra yang harganya fluktuatif. "Kelapa bisa menyejahterakan banyak orang," katanya.

Kepala Balai Karantina Pertanian (Barantan) Manado Donni Muksydayan Saragih mengatakan senang dengan semakin beragamnya ekspor pertanian dan perkebunan dari Sulut. Pandemi justru membuka peluang bagi industri produk turunan kelapa untuk memasok *cocopeat* yang banyak dicari seiring tumbuhnya kegemaran bercocok tanam di Korsel.

"Ini angin segar bagi petani dan industri kelapa di Sulut. Kami siap mengawal dengan memberikan fasilitas perkarantinaan, seperti penerbitan sertifikat fitosanitari untuk proses ekspornya. Kalau keamanan produk terjamin, ekspor juga akan terus bertumbuh," ujar Donni.

Barantan Manado pun berupaya berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Bank Indonesia dan pemerintah daerah, untuk mencari pelaku usaha kecil dan menengah yang mampu mengekspor. "Kami akan memberikan pendampingan teknis untuk memenuhi persyaratan ekspor," kata Donni.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut Edwin Kindangen mengatakan, ekspor kelapa dapat secara langsung menyejahterakan warga Sulut. Sebab, 200.763 keluarga di Sulut berpenghasilan dari perkebunan kelapa. "Kelapa hasil utama Sulut dan banyak masyarakat yang terkait dengannya, hasilnya pasti signifikan," katanya.

19 komoditas ekspor

Sepanjang Januari 2021 ada 19 komoditas yang diekspor dari Sulut ke 21 negara dengan nilai Rp 566,91 miliar. Berbagai produk turunan kelapa termasuk dalam 19 komoditas itu, seperti minyak, minyak mentah, santan, tepung, bungkil, dan kelapa parut.

CV Puri Bitung Gemilang rutin mengekspor serat kelapa ke China untuk memasok pabrik-pabrik pembuat kasur pegas, jok mobil, dan jok pesawat. Namun, Hermanto khawatir tak mampu rutin mengekspor *cocopeat* karena faktor cuaca yang kurang mendukung untuk pengeringan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perkebunan Sulut Refly Ngantung menyatakan akan menanam 60.000 hektar lahan tidak produktif dengan 7,2 juta bibit unggul kelapa. Adapun Edwin mengatakan, pemerintah berupaya memberikan kemudahan dengan penerbitan surat keterangan asal hingga hitungan menit sebelum ekspor diberangkatkan. (OKA)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☒ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 10/2/2019 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☒ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Kemendag Usulkan Ambang Batas PE CPO Dihapus

JAKARTA - Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengusulkan kepada pemerintah untuk menghapus ambang batas harga (*threshold*) CPO dalam melakukan pungutan ekspor (PE). Penghapusan *threshold* tersebut akan diganti dengan mekanisme pungutan ekspor yang sebelumnya pernah diberlakukan.

"Saya merekomendasikan kepada pemerintah untuk kembali ke mekanisme pungutan ekspor sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 81 Tahun 2018, di mana tidak terdapat *threshold* harga untuk melakukan pungutan. Besarnya tarifnya bersifat spesifik, yakni setiap dolar per ton, dan diterapkan secara progresif mulai dari produk hilir ke hulu," kata Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ekspor BP3 Kemendag Immanuel Lingga dalam diseminasi hasil penelitian BPPP Kemendag secara daring, Selasa (9/2).

Lingga meyakini, pungutan ekspor CPO dapat mendorong perkembangan industri hilir sawit dalam negeri. Pasalnya, setiap kenaikan US\$ 1 pungutan ekspor akan meningkatkan ekspor produk turunan sawit ke dunia hingga 0,32%.

"Penemuan ini berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Februari saat harga sawit belum melampaui US\$ 570 per ton," ujar dia.

Pada saat itu, menurut Lingga, dalam Permenkeu Nomor 136 Tahun 2019, pemerintah baru bisa melakukan pungutan ekspor apabila harga CPO menyentuh atau di atas rata-rata US\$ 570 per ton. Dalam PMK

81/2018, pemerintah menetapkan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit berupa produk CPO (1511.10.00) dan CPOK (1513.21.10) sebesar US\$ 50/ton.

Lingga mengatakan, terdapat opsi kedua, yakni pemerintah tetap menggunakan *threshold* harga seperti saat ini, tetapi perlu adanya perubahan nilai pungutan ekspor ketika harga CPO di bawah *threshold* guna menjaga daya saing industri dalam negeri. "Besaran pungutan ekspor berkisar US\$ 5-10 per ton," ujar dia.

Menurut Lingga, kebijakan pungutan ekspor CPO juga berkorelasi negatif dengan harga tandan buah segar (TBS). Semakin tinggi nilai pungutan, harga TBS akan semakin tertekan. Setiap kenaikan pungutan sebesar US\$ 1 akan menekan harga TBS sebesar 0,26%.

Sementara itu, kebijakan pungutan ekspor CPO berkorelasi negatif dengan volume ekspor CPO Indonesia ke Malaysia. Setiap kenaikan pungutan US\$ 1 akan menurunkan volume ekspor CPO Indonesia ke Malaysia sebesar 2,2%.

Menurut Lingga, hal itu akan membuat industri kelapa sawit Indonesia lebih berdaya saing. "Dengan pungutan ekspor, ada kesetaraan antara daya saing industri Indonesia dan Malaysia. Karena Malaysia juga cukup mengandalkan bahan baku dari Indonesia. Namun *cost* industri mereka rendah, yang didukung oleh infrastruktur yang baik dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga ketika mereka punya suplai CPO yang baik, daya saing mereka juga baik," kata Lingga. (sny)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☒ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 10/2/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☒ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

SMAR Perkuat Pasar Ekspor dan Biodiesel

JAKARTA. PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) mengungkapkan fundamental industri sawit masih kuat karena sejumlah faktor. Selain prospeknya bagus di pasar negeri, potensi bisnis minyak sawit mentah (CPO) juga cukup menarik di pasar luar negeri.

Investor Relations PT Sinar Mas Agribusiness and Food, Pinta S Chandra menjelaskan, prospek permintaan ekspor CPO ke luar negeri secara jangka panjang tetap bagus. Hal ini didukung fundamental kuat, pemakaian minyak sawit yang luas, serta harga yang kompetitif dibandingkan minyak nabati lainnya.

"Kami telah mengirimkan produk-produk baik CPO dan produk rafinasi ke lebih dari 70 negara dengan fokus utama di pasar-pasar yang berkembang. Permintaan CPO akan tetap kuat terutama di negara konsumen yang mengisi kembali persediaannya seperti India dan Tiongkok," kata dia kepada KONTAN, kemarin.

Pinta mengatakan, SMAR akan terus berupaya meningkatkan cakupan pasar di negara-negara tersebut, antara lain melalui kustomisasi pro-

duk untuk memenuhi permintaan pelanggan atas produk-produk dengan nilai tambah.

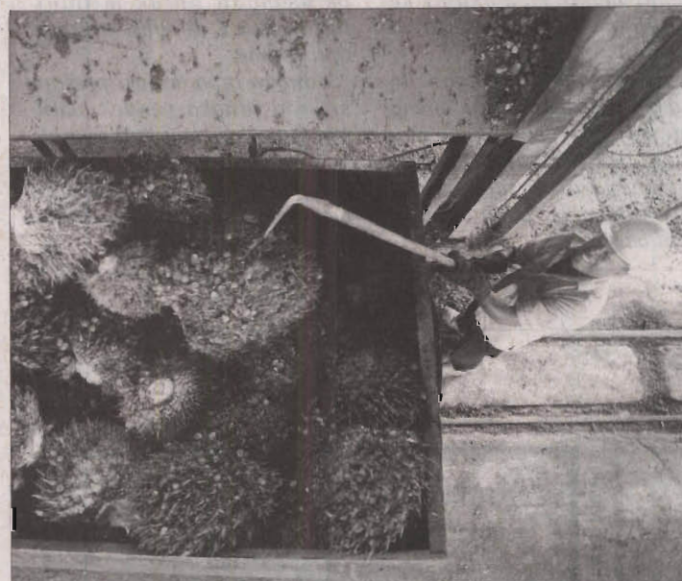
SMAR memang mengeksport produk CPO berbagai negara, terutama India dan China. Anak usaha Grup Sinar Mas ini optimistis permintaan ekspor CPO dalam jangka panjang tetap baik.

Terkait dengan proyeksi produksi dan penjualan CPO SMAR pada tahun 2021, Pinta mengungkapkan, hal tersebut masih dalam proses pembahasan secara internal. Namun yang pasti, manajemen SMAR menilai bahwa kondisi cuaca menjadi faktor utama yang akan mempengaruhi proses produksi minyak sawit mentah perusahaan ini.

Menurut Pinta, kondisi cuaca kering yang terjadi pada pertengahan tahun 2019 telah mempengaruhi produksi kebun SMAR pada periode Januari sampai dengan September 2020. (KNT)

Alhasil, output produksi sawit perusahaan ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. "Kami mengharapkan produksi kebun dapat kembali normal di tahun 2021," ucap dia.

Selain memasok CPO untuk



KONTAN/Baihaki

Prospek permintaan ekspor CPO ke luar negeri secara jangka panjang akan tetap baik.

keperluan minyak sawit, Pinta menjelaskan SMAR memasok metil ester asam lemak atau *fatty acid methyl ester* (FAME) untuk keperluan biodiesel di Indonesia. "SMAR juga fokus memenuhi alokasi pengadaan Bahan Bakar Nabati (EBN) dari pemerintah untuk tahun 2021 yang telah ditentukan sebesar 717.000

kiloliter (kl)," jelas Pinta.

Saat ini SMAR telah mengalokasikan kapasitas pabrik biodiesel untuk memenuhi program kewajiban penggunaan biodiesel (B30) di Indonesia. Tahun ini, pemerintah masih menunda penerapan kebijakan program B40.

Arfiana Citra, Dimas Andi

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☒ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☐ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 10/09/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☒ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

Badan Pangan Nasional Harus Segera Terealisasi

ANGGOTA Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo menilai pembentukan badan pangan nasional (BPN) harus segera terealisasi untuk menyelesaikan karut-marut persoalan pangan.

"Keinginan konsep DPR sederhana, bagaimana untuk memenuhi dan menyelesaikan karut-marut persoalan pangan memerlukan badan/lembaga yang besar dan kuat dan bertanggung jawab langsung ke presiden," kata Firman dalam rapat dengar pendapat umum Baleg DPR dengan narasumber di Jakarta, kemarin.

Namun, dalam Pasal 151 Undang-Undang (UU) No 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai dasar pembentukan BPN dicantumkan bahwa pembentukan BPN maksimal 3 tahun sejak UU diundangkan. Maka, ketentuan tersebut sudah terlewat. "Kalau ini dibentuk, apakah ini melanggar UU atau tidak karena sudah lewat," ucapnya.

Menurut mantan Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso, implementasi UU No 18 Tahun 2012 tersebut harus lebih dimaksimalkan dengan peraturan turunan agar lebih bersinergi.

"Perlu dilengkapi dengan PP, perpres, permen, perda, serta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, penyediaan anggaran pembangunan pangan secara cukup antarsektor," kata Sutarto.

UU tersebut seharusnya mendorong ketersediaan komoditas untuk masyarakat secara mandiri. Harga pangan murah juga harus terus dievaluasi berkelanjutan. Hal itu sebagai jaminan harga dan pasar untuk stabilisasi sehingga diperlukan pembentukan badan pangan. Namun, beberapa peraturan perundangan turunannya dan pembentukan kelembagaan badan pangan belum terlaksana.

Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Siti Subandiyah menilai lembaga nonstruktural, yakni Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dan Perum Bulog, belum maksimal untuk memecahkan masalah pangan. "Pangan secara kualitas masih perlu ditingkatkan sehingga belum maksimal karena kita masih memiliki kelompok yang kekurangan gizi baik yaitu anak-anak," jelasnya. (Iam/E-3) M 1. 10

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|---|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☒ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☐ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 10/2/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 9 / |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☒ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☒ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |



PETANI MUDA Petani merawat tanaman daun bawang di Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (9/2). Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian mencatat petani muda di Indonesia yang berusia 20-39 tahun hanya berjumlah 2,7 juta orang atau sekitar delapan persen dari total jumlah petani di Indonesia. R.G

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☒ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 10/2/2021
☐ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☒ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☐ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☒ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

Anggaran Kemtan Dikurangi Menjadi Rp 15,5 Triliun



ANTARA/M Ibnu Chazar

Dengan adanya pemangkasan anggaran tersebut, Kemtan pun menyesuaikan anggaran.

JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kemtan) turut menghadapi pemotongan anggaran sebesar Rp 6,33 triliun pada tahun APBN 2021. Anggaran belanja Kemtan pada tahun ini pun turun menjadi Rp 15,51 triliun. Hasil pemangkasan itu untuk menambah anggaran vaksinasi Covid-19.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, Senin (8/2) menjelaskan, pada awalnya Kementerian Pertanian memiliki alokasi anggaran Rp 21,84 triliun. Namun, sesuai surat Menteri Keuangan No. S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021, Kementerian Pertanian diharuskan memotong belanja Rp 6,33 triliun, sehingga turun menjadi Rp 15,51 triliun.

Dengan adanya pemangkasan anggaran tersebut, Kemtan pun menyesuaikan alokasi anggaran. Misalnya untuk Sekretariat Jenderal Rp 1,66 triliun, Inspektorat Jenderal Rp 100 miliar, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Rp 3,23 triliun, Direktorat Jenderal Hortikultura Rp 775 miliar, dan Direktorat Jenderal Perkebunan Rp 1 triliun.

Selanjutnya untuk Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp 1,38 triliun, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Rp 3,54 triliun, Badan Litbang Pertanian Rp 1,23 triliun, Badan PPSDMP Rp 1,09 triliun, Badan Ketahanan Pangan Rp 553 miliar, dan Badan Karantina Pertanian Rp 958 miliar.

Bila dirinci berdasarkan program yang akan dijalankan di 2021, maka terdapat 5 program yang akan dijalankan Kemtan tahun ini. Mulai dari program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas dengan anggaran sebesar Rp 8 triliun, program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp 1,32 triliun, program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp 788,11 miliar, program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sebesar Rp 309,56 miliar, serta program dukungan manajemen sebesar Rp 5,09 triliun. *KM-14*

Lidya Yuniartha Panjaitan

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☒ Seputar Indonesia | TANGGAL 10/7/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 6/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

DPR Dorong Penambahan Anggaran Kementerian Pertanian

JAKARTA – Sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI mendukung penambahan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021. DPR mendukung tambahan tersebut mengingat sektor pertanian merupakan sektor strategis yang sangat dominan dalam memberi kontribusi terhadap peningkatan dan perbaikan ekonomi nasional.

Anggota Komisi IV DPR RI Abdullah Tuasikal mengatakan, sektor pertanian patut mendapat perhatian serius karena terbukti mampu berkontribusi positif terhadap perbaikan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19.

Abdullah menambahkan, hal tersebut ditujukan dengan kemampuan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja serta menaikkan nilai ekspor pertanian. Selain itu peningkatan tolok ukur kesejahteraan petani melalui Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus mengalami perbaikan.

"Kami menyesalkan pemotongan anggaran belanja Kementan karena untuk mengoptimalkan program-program untuk mencapai target dibutuhkan dukungan anggaran yang cukup. Karena itu

kami mendukung penambahan anggaran Kementan," katanya saat Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (8/02).

Hal senada dikatakan Anggota Komisi IV DPR lainnya Andi Akmal Pasluddin.

"Pemotongan anggaran Kementan berdampak negatif terhadap pemulihan ekonomi nasional. Seharusnya anggaran Kementan ditambah, bukan malah dikurangi. Karena itu kami dukung adanya penambahan," ujarnya.

Lebih lanjut, Andi Akmal menyoroti program nilai tambah dan daya saing industri yang merupakan salah satu program kerja Kementan di 2021. Menurutnya, program tersebut harus mendapat perhatian khusus karena mampu meningkatkan ekspor pertanian Indonesia.

"Berbicara hal ini pasti terbesit peningkatan ekspor. Tahun 2020 nilai ekspor pertanian naik 15,79% dan ini perlu terus kita dorong dengan anggaran yang layak," katanya.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo me-

negaskan terkait program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, pihaknya telah mendesain kegiatan prioritas tersebut dan sudah diimplementasikan di seluruh daerah.

"Yaitu dengan dukungan logistik benih unggul melalui pembangunan kebun sumber benih atau nursery sebanyak 70 juta batang, pengembangan kawasan perkebunan unggul nasional berbasis korporasi seluas 35.890 hektare (ha) dan lainnya," katanya.

Mentan menambahkan, program tersebut terdistribusi di Ditjen Perkebunan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sementara Ditjen Perkebunan diharapkan menjadi gerbang penggerak untuk mewujudkan produk pertanian yang berdaya saing. "Kita berharap, pertanian semakin maju, semakin mandiri dan modern," tutupnya.

■ **sudarsono**

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 10/2/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☒ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Anggota DPR Tanya Mentan Mana Nih, Juklak- Juknis Lumbung Pangan Dunia

Politisi Senayan mendesak Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo segera menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis (Juklak dan Juknis) tentang pedoman pembangunan pertanian menuju Lumbung Pangan Dunia 2045.

ANGGOTA Komisi IV DPR, Ema Umiyyatul Chusnah mengatakan, Juklak dan Juknis ini sangat penting, untuk mendorong peningkatan produktivitas pangan strategis. Juga untuk kemudahan berusaha dan mendorong minat generasi muda terjun ke sektor pertanian.

Pihaknya dari Fraksi PPP, ujarnya, meminta seluruh Direktorat Jenderal untuk segera melakukan revisi Juknas-Juknis program bantuan Kementan. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor Tahun 4 Tahun 2019 dan

perubahan Permentan Nomor 9 tahun 2019. *R.M. 7*

Sebagaimana diketahui, road map kebijakan Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 diterbitkan di periode pertama pemerintahan Presiden Joko

Widodo. Saat itu, Jokowi menginstruksikan kepada Menteri Pertanian Periode 2014-2019 Andi Amran Sulaiman untuk melakukan swasembada padi, jagung, dan kedelai (pajale) dalam tempo tiga tahun. Road Map ini kemudian dituangkan dalam bentuk 'Sukses Swasembada Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045'.

Program Lumbung Pangan Dunia 2045 ini juga fokus pada pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di wilayah perbatasan. Ini sebagai bentuk kehadiran negara di wilayah perbatasan, yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh negara.

Ema juga menyoroti program peningkatan SDM Pertanian, yang seharusnya tidak dilakukan hanya dalam lingkup kecil Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani (Poktan/Gapok-

tan) saja. Tapi bisa juga dirasakan oleh kelompok masyarakat atau lembaga lain, seperti petani milenial, petani andalan, santri tani, perempuan tani dan pelaku usaha di bidang pertanian.

Sementara Wakil Ketua Komisi

IV Anggia Erma Rini menyoroti masalah pupuk. Sebenarnya, ini bukan masalah pasokan saja. Sebab, seringkali masalahnya adalah pupuk baru datang, saat petani sudah melewati masa pemupukan.

"Karena itu sangat penting untuk dilihat, sebenarnya masalah (pupuk) ini di sebelah mana, karena sering kali tidak ada. Kalaupun ada, sudah selesai nih fase untuk memberikan pupuk kepada tanaman," katanya.

Sedangkan Anggota Komisi IV, Alies Mus menyoroti banyaknya posisi direktur di Kementan yang masih kosong dan sudah memasuki masa pensiun. Namun tak kunjung segera diisi pengantinya.

"Kalau periode menteri yang lalu relatif lebih tepat waktu.

Harusnya yang sekarang, juga lebih tepat waktu, menggantikan para eselon yang sudah masuk usia pensiun," katanya.

Alien mengatakan, penggantian pejabat ini diperlukan, demi menghindari isu adanya praktik staf menteri yang kebijakannya tidak mencerminkan *good governance*. "Jangan sampai ada orang-orang yang main di belakang membawa nama bapak sebagai menteri, tapi bapak tidak mengetahuinya," sarannya.

Menanggapi hal ini, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan, pihaknya akan terus berupaya memperbaiki semua persoalan pertanian, termasuk pupuk. Disadarinya, beberapa masalah pertanian itu terjadi karena adanya permainan pihak-pihak tertentu. ■ KAL

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 10/12/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

ABU GUNUNG RAUNG

Ratusan Hektar Pertanian Terdampak

BANYUWANGI, KOMPAS — Erupsi Gunung Raung membentuk kolom abu hingga 2.500 meter dari puncak dan mengarah ke timur, Selasa (9/2/2021). Sebaran abu ke lahan pertanian merusak sejumlah komoditas.

Menurut data Dinas Pertanian Banyuwangi, abu vulkanik berdampak pada 440 hektar lahan pertanian. Tanaman budidaya rusak dan panen terganggu.

"Pemetaan kami, beberapa komoditas yang ditanam di lahan terdampak, antara lain semangka, kubis, cabai besar, cabai rawit, tomat, daun bawang, dan mentimun," kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuwangi Arief Setyawan, kemarin.

Komoditas paling terdampak adalah cabai besar. Lahan itu berada di empat kecamatan, yakni Kecamatan Kalibaru (46 ha), Glenmore (46 ha), Songgon (17 ha), dan Sempu (39 ha).

Arief menjelaskan, dalam jangka pendek abu vulkanik memang berdampak buruk bagi pertanian. Namun, dalam jangka panjang, meningkatkan kadar mineral di lahan pertanian.

"Mungkin saat ini ada petani yang merasa dirugikan karena abu vulkanik. Namun, di sisi lain, abu vulkanik membantu mengusir hama serangga atau gulma. Dalam jangka panjang, sangat positif bagi peningkatan produktivitas tanah," katanya.

Salah satu petani yang merasakan dampak sebaran abu

vulkanik ialah Riski Subito (42). Lahan tomat ranti nyaris rata terpapar abu. Butiran abu kasar masih tampak jelas menempel di daun hingga kulit buah.

"Abu Gunung Raung membuat bunga mudah rontok sehingga tak sempat jadi buah. Kalau abu jatuh di daun muda, daun lebih mudah terpapar panas. Saat kena terik matahari, pasir ikut membakar permukaan daun," ungkapnya.

Tak hanya itu, abu di kulit buah tak hanya membuat kotor, tetapi juga merusak kesegaran dan tampilan buah. Petani bekerja ekstra membersihkan buah-buah yang baru dipanen.

"Saat ini sudah masuk periode petik kelima, saya tidak yakin hasilnya menyamai panen tahun lalu. Bunganya sudah telanjur rontok kena abu," katanya. Panen lalu, ia mendapatkan 1 ton buah per 0,25 ha.

Hal senada disampaikan Buang Cahyono, petani daun bawang di Desa Sumberarum, Kecamatan Songgo. Lahannya 10 km dari puncak Raung. "Daun bawang yang kena abu langsung kemerahan seperti terbakar. Daun langsung tidak segar lagi. Panenan saya bisa berkurang hingga 25 persen," katanya.

Sebaran abu baru dirasakan petani di Desa Sumberarum satu bulan terakhir. Adapun Gunung Raung mulai erupsi sejak 21 Januari.

Aktivitas vulkanis

Selasa kemarin, kepulan abu

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 10/2/2021 |
| ☐ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☒ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☐ Opini/Artikel |
| ☒ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |



KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Diandri (19) dan Rian (15) merawat tanaman bawang daun (bawang prei) di sawah milik keluarga mereka di Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (9/2/2021). Tampak di kejauhan erupsi Gunung Raung. Gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, dan Jember ini mengalami erupsi sejak 21 Januari 2021. Dalam seminggu terakhir, aktivitas vulkanik meningkat, yang ditunjukkan dari semakin banyaknya abu yang keluar.

vulkanik dari puncak Gunung Raung yang berada di perbatasan Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso, teramati dari Desa Sumberarum, Kecamatan Songgon. Ketinggian abu dilaporkan 2 km dari puncak dan tertiup ke arah timur hingga ke Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Laporan dari Pos Pengamatan Gunung Api Raung, intensitas erupsi terus menunjukkan peningkatan. Hal itu tampak dari ketinggian kolom abu yang mencapai 2,5 km dari atas puncak. Ketinggian itu tertinggi dalam periode erupsi 2021.

Sementara itu, di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pengungsi erupsi Gunung Merapi dipulangkan ke rumah masing-masing. Pemulangan didasari letak rumah warga yang masih di luar radius ancaman bahaya erupsi.

Kemarin, 137 pengungsi dipulangkan. Mereka adalah kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, perempuan, anak-anak, dan anak balita. Mereka berasal dari Dusun Turgo, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem. Dusun itu terletak di sisi barat daya Merapi. "Kami akan ikuti aturan. Tetap was-

pada," kata Tukirah (45), pengungsi dari Turgo.

Warga mengungsi di Barak Purwobinangun sejak 27 Januari 2021. Saat itu, luncuran awan panas 3,5 km mengarah ke sisi barat daya. Itu jarak terjauh selama fase erupsi Merapi sejak 4 Januari.

"Dalam memulangkan pengungsi, kami berpedoman pada rekomendasi BPPTKG (Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi). Itu yang kami pegang," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sleman Joko Supriyanto. (GER/NCA)

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

☐ Tanaman Pangan	☐ Litbang Pertanian
☐ Hortikultura	☐ Ketahanan Pangan
☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan	☐ Karantina Pertanian
☐ Perkebunan	☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
☐ Prasarana dan Sarana Pertanian	☒ Pertanian Umum

MEDIA

☐ Agro Indonesia	☐ Koran Jakarta	☐ Seputar Indonesia	TANGGAL 6/2/2021
☒ Bisnis Indonesia	☐ Koran Tempo	☐ Sinar Harapan	HALAMAN 2 / 1
☐ Indo Pos	☐ Majalah Tempo	☐ Sinar Tani	RUBRIKASI ☐ Berita
☐ Investor Daily	☐ Media Indonesia	☐ Suara Karya	☐ Berita Foto
☐ Jurnal Nasional	☐ Pelita	☐ Suara Pembaruan	☒ Opini/Artikel
☐ Kompas	☐ Rakyat Merdeka	☐ The Jakarta Post	☐ Tajuk
☐ Kontan	☐ Republika		☐ Pojok/Karikatur

Pertanian Unjuk Gigi Lagi

Sebagaimana diduga, pandemi telah menyebabkan kontraksi perekonomian Indonesia yang mencatat pertumbuhan minus 2,07% selama 2020. Rilis resmi Badan Pusat Statistik 5 Februari 2021 mengonfirmasi resesi ekonomi tersebut. Di sisi lain, sektor pertanian mampu tumbuh positif 1,75% pada 2020 atau selama pandemi, karena produksi pertanian meningkat, harga komoditas cukup bersahabat dan aspek resiliensi atau ketangguhan pertanian itu sendiri.

Pertumbuhan itu masih lebih rendah dari pertumbuhan pertanian pada 2019 sebesar 3,61% walaupun kemarau ekstrem pada Juli—September 2019. Mirip saat krisis ekonomi Asia pada 1998, sektor pertanian sekali lagi telah menjadi bantalan selama resesi ekonomi dan bahkan menjadi alternatif sumber mata pencaharian masyarakat.

Pada Q4/2020 sektor pertanian mencatat pertumbuhan positif bersama enam sektor lain, yaitu jasa kesehatan dan kegiatan sosial (16,54%), informasi dan komunikasi (10,91%), pengadaan air (4,98%), jasa keuangan dan asuransi (2,37%), jasa pendidikan (1,36%), dan real estat (1,25%). Pangsa produk domestik bruto (PDB) pertanian

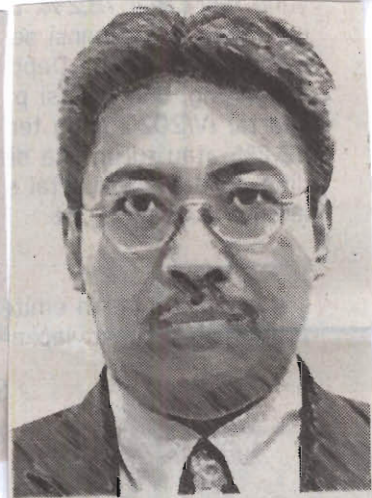
naik dari 12,71% pada 2019 menjadi 13,71% pada 2020. Fenomena ini perlu diwaspadai seksama, karena hal tersebut akan memengaruhi arah transformasi struktural perekonomian Indonesia.

Menurut teori standar ekonomi pembangunan, semakin maju suatu bangsa, pangsa pendapatan dari sektor pertanian akan semakin berkurang, sementara pangsa dari sektor industri manufaktur dan jasa akan semakin bertambah.

Pada kondisi resesi atau krisis ekonomi, proses transformasi struktural perekonomian itu umumnya terganggu, terutama karena cukup banyak masyarakat yang menjadikan sektor pertanian sebagai *the last resort* untuk bertahan hidup. Tenaga kerja sektor pertanian meningkat signifikan dari 36,71 juta (27,53% dari total angkatan kerja 133,36 juta orang) pada Agustus 2019 menjadi 41,13 juta orang (29,76% dari total angkatan kerja 138,22 juta orang) pada Agustus 2020.

Peningkatan ini menjadi tambahan beban sektor pertanian, karena produktivitas tenaga kerjanya cukup rendah. Oleh karena itu, sektor pertanian wajib memanfaatkan perubahan teknologi dalam bidang produksi, panen dan pascapanen ke depan.

Di dalam sektor pertanian,



BUSTANUL ARIFIN
Guru Besar Universitas Lampung

hortikultura dan tanaman pangan mencatat pertumbuhan paling tinggi, yaitu 4,17% dan 2,11% pada 2020. Perkebunan mencatat pertumbuhan rendah 1,33% pada 2020, karena harga jual karet, sawit dan kopi cukup rendah. Peternakan mencatat pertumbuhan negatif -0,33% karena harga daging ayam dan telur di tingkat peternak sangat rendah, bahkan sejak Ramadan dan Idulfitri 2020.

Kehutanan dan penebangan kayu juga mencatat pertumbuhan negatif -0,03% karena realisasi pemenuhan bahan baku industri penebangan kayu juga rendah. Perikanan mencatat pertumbuhan positif 0,73% meski persoalan logistik tersendat sejak awal pandemi.

KLIPING BERITA KEMENTERIAN PERTANIAN

SUBJEK

- | | |
|---|--|
| ☐ Tanaman Pangan | ☐ Litbang Pertanian |
| ☐ Hortikultura | ☐ Ketahanan Pangan |
| ☐ Peternakan dan Kesehatan Hewan | ☐ Karantina Pertanian |
| ☐ Perkebunan | ☐ Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian |
| ☐ Prasarana dan Sarana Pertanian | ☒ Pertanian Umum |

MEDIA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Agro Indonesia | ☐ Koran Jakarta | ☐ Seputar Indonesia | TANGGAL 6/2/2021 |
| ☒ Bisnis Indonesia | ☐ Koran Tempo | ☐ Sinar Harapan | HALAMAN 2/1 |
| ☐ Indo Pos | ☐ Majalah Tempo | ☐ Sinar Tani | RUBRIKASI ☐ Berita |
| ☐ Investor Daily | ☐ Media Indonesia | ☐ Suara Karya | ☐ Berita Foto |
| ☐ Jurnal Nasional | ☐ Pelita | ☐ Suara Pembaruan | ☒ Opini/Artikel |
| ☐ Kompas | ☐ Rakyat Merdeka | ☐ The Jakarta Post | ☐ Tajuk |
| ☐ Kontan | ☐ Republika | | ☐ Pojok/Karikatur |

Sumber-sumber pertumbuhan pertanian Indonesia lebih berupa akumulasi kapital, akumulasi tenaga kerja dan perubahan teknologi (Fahmi dkk, 2020). Faktor produktivitas total (*total factor productivity*/TFP) sangat rendah pada 15 tahun terakhir. Padahal, perubahan teknologi pertanian pernah dicatat sejarah mampu melonjakkan produktivitas padi dan tanaman pangan lain, bahkan mengantar Indonesia mencapai swasembada beras pada 1980-an. Selama 20 tahun terakhir pertumbuhan TFP sektor pertanian justru menunjukkan tren semakin menurun.

Pertanian nasional membutuhkan akumulasi kapital yang mampu mendorong perubahan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Dalam kaitan itu, beberapa hal perlu diperhatikan. *Pertama*, kebijakan yang mampu memfasilitasi perubahan teknologi, peningkatan kualitas benih dan input lain akan berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan positif pertanian. Intervensi kebijakan dalam menggerakkan sumber-sumber pertumbuhan sektor pertanian akan mampu menahan atau meredam dampak krisis ekonomi yang lebih buruk lagi.

Kedua, kebijakan untuk meningkatkan TFP wajib diupayakan, terutama dalam jangka menengah-panjang,

seperti perbaikan kinerja badan penelitian dan pengembangan kementerian, penyempurnaan ekosistem inovasi yang melibatkan ABGC (*academics, business, government and civil society*) secara sinergis. Berhubung perbaikan TFP perlu waktu lama, kebijakan yang mampu memfasilitasi investasi atau akumulasi kapital di sektor pertanian menjadi pilihan rasional dalam jangka pendek ke depan.

Ketiga, kebijakan di tingkat daerah yang menjadikan sektor pertanian sebagai basis atau penopang, terutama di Jawa dan Sumatera, sangat perlu diberdayakan. *Keempat*, perhatian khusus perlu diberikan pada subsektor perikanan, terutama dalam perbaikan rantai nilai dan sistem logistiknya. Rendahnya nilai tambah subsektor perikanan selama ini, karena industri perikanan mengalami banyak kendala rendahnya bahan baku pasokan ikan. Langkah terobosan amat diperlukan, misalnya perbaikan dan reorientasi kebijakan tol laut, pembenahan insentif sistem transportasi arus balik (dari luar Jawa), serta peningkatan ekspor langsung menggunakan kargo udara yang jauh lebih efisien.

Kelima, pengembangan sumber daya manusia pertanian yang mampu kompatibel dengan perubahan teknologi pertanian atau peningkatan TFP. Termasuk di dalamnya antara lain akses keuangan dan perbankan.